



ANALISIS BUDAYA POLITIK MINANGKABAU DALAM FILM TENGGEAMNYA KAPAL VAN DER WIJCK

ANALYSIS OF MINANGKABAU POLITICAL CULTURE IN THE FILM THE SINKING OF THE VAN DER WIJCK

Frans Tory Damara Pradipta¹⁾

¹⁾ Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung

*Korespondensi Penulis: franstory24@gmail.com

Diajukan: 14 Juni 2025 / Direvisi: 18 Agustus 2025/ Disetujui: 25 Agustus 2025

Abstrak

Film adalah media kuat yang merepresentasikan dan memengaruhi persepsi budaya. Penelitian ini menganalisis representasi budaya politik Minangkabau dalam film "Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck", sebuah karya sinematik yang sarat akan nilai-nilai adat. Masyarakat Minangkabau dikenal dengan sistem kekerabatan matrilineal dan filosofi "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah", yang membentuk identitas kultural dan struktur politik mereka. Film ini dipilih sebagai objek kajian karena secara eksplisit menampilkan dinamika adat dan konflik individu versus kolektif pada era 1930-an.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur ekstensif tentang budaya Minangkabau dan konsep budaya politik, serta analisis film "Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck". Film ditonton secara seksama untuk mengidentifikasi adegan, dialog, dan simbol yang merefleksikan nilai-nilai dan dinamika kekuasaan adat. Data dianalisis melalui reduksi, penyajian, dan verifikasi untuk menarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa film ini secara efektif merepresentasikan budaya politik Minangkabau melalui tiga aspek utama: (1) Sistem matrilineal sebagai fondasi legitimasi sosial dan politik, di mana status keturunan ibu menentukan penerimaan individu dan memengaruhi keputusan personal seperti pernikahan; (2) Prinsip "Adat Basandi Syarak" yang mengikat otoritas adat (Ninik Mamak) dalam pengambilan keputusan kolektif, meskipun terkadang interpretasi adat yang kaku mendominasi; dan (3) Konflik antara kehendak individu dan tuntutan kolektif, yang secara dramatis digambarkan melalui penderitaan karakter utama yang harus tunduk pada norma komunal yang kuat. Secara keseluruhan, film ini menjadi cermin kompleksitas budaya politik Minangkabau, menunjukkan bagaimana tradisi lokal membentuk struktur kekuasaan dan membatasi kebebasan individu demi menjaga harmoni komunitas.

Kata Kunci: Budaya Politik, Minangkabau, Film, Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck, Matrilineal, Adat Basandi Syarak.

Abstract

Film serves as a powerful medium for representing and influencing cultural perceptions. This research analyzes the representation of Minangkabau political culture in the film "Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck" (The Sinking of the Van Der Wijck Ship), a cinematic work imbued with profound customary values. Minangkabau society is renowned for its matrilineal kinship system and the philosophical principle of "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" (Custom based on Islamic Law, Islamic Law based on the Qur'an), both of which shape their cultural identity and political structure. This film was chosen as the object of study due to its explicit portrayal of customary dynamics and the conflict between individual and collective interests during the 1930s.



This study employs a qualitative methodology, utilizing an extensive literature review on Minangkabau culture and concepts of political culture, alongside a film analysis of "Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck." The film was meticulously viewed to identify scenes, dialogues, and symbols that reflect the values and power dynamics of Minangkabau custom. Data were analyzed through reduction, presentation, and verification to draw conclusions.

The findings indicate that the film effectively represents Minangkabau political culture through three main aspects: (1) The matrilineal system serves as the foundation of social and political legitimacy, where the mother's lineage determines an individual's acceptance and influences personal decisions like marriage; (2) The "Adat Basandi Syarak" principle binds the authority of traditional leaders (Ninik Mamak) in collective decision-making, though rigid interpretations of custom often dominate; and (3) The conflict between individual will and collective demands, dramatically depicted through the suffering of the main characters who must submit to strong communal norms. Overall, the film acts as a rich mirror to the complexities of Minangkabau political culture, illustrating how local traditions shape power structures and limit individual freedom for the sake of community harmony.

Keywords: Political Culture, Minangkabau, Film, *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck*, Matrilineal, Adat Basandi Syarak

Pendahuluan

Film, sebagai salah satu artefak budaya dan media komunikasi massa, memiliki kapasitas luar biasa untuk melampaui batas hiburan semata. Ia berfungsi sebagai kanvas refleksi sosial, tempat ideologi, nilai-nilai, dan struktur masyarakat direpresentasikan, dinegosiasikan, dan bahkan dibentuk dalam kesadaran kolektif (Akmal, 2022). Lebih dari itu, film mampu menjadi sebuah catatan sejarah tidak langsung, mengabadikan dan menyajikan kembali potret kehidupan, adat istiadat, serta dinamika politik suatu zaman atau komunitas. Di Indonesia, sebuah negara kepulauan yang diberkahi dengan pluralitas suku dan budaya, setiap entitas etnis menyimpan kekayaan narasi yang tak ada habisnya untuk diangkat ke layar lebar, menawarkan perspektif unik tentang identitas dan realitas keberagaman bangsa.

Di antara gugusan kebudayaan di Nusantara, Minangkabau berdiri sebagai sebuah peradaban yang memukau dengan kekhasan dan kompleksitasnya. Masyarakat Minangkabau dikenal secara luas dengan sistem kekerabatan matrilinealnya, sebuah sistem yang menempatkan garis keturunan ibu sebagai penentu identitas, warisan, dan bahkan otoritas dalam tatanan sosial (Sulhati, 2020). Berbeda dari kebanyakan suku bangsa di Indonesia yang menganut sistem patrilineal, matriarkat Minangkabau tidak hanya memengaruhi struktur keluarga, tetapi juga norma-norma kemasyarakatan, pola kepemimpinan, hingga proses pengambilan keputusan kolektif, yang secara implisit merefleksikan budaya politiknya yang khas (Trisnawati & Yesicha, 2018). Fondasi spiritual dan filosofis kehidupan Minangkabau terangkum dalam adagium "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" (adat bersendikan syariat, syariat bersendikan Kitabullah). Prinsip ini menegaskan harmonisasi antara hukum adat yang diwarisi turun-temurun dengan ajaran Islam, menciptakan sebuah identitas kultural yang terjalin erat antara tradisi lokal dan nilai-nilai agama (Asniah, 2023; Fajria & Fitrisia, 2024; Khairuna *et al.*, 2024; Althafullayya & Akbar, 2024). Integrasi ini membentuk sebuah sistem nilai yang kompleks, di mana adat bukan sekadar aturan, melainkan pengejawantahan dari nilai-nilai keagamaan, dan sebaliknya, agama menjadi penopang moral bagi pelaksanaan adat.



Dalam konteks sinema Indonesia, film "Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck" (2013), yang diadaptasi dari mahakarya sastrawan terkemuka Buya Hamka, menyajikan sebuah narasi yang mendalam dan relevan untuk mengkaji budaya Minangkabau. Film ini bukan sekadar romansa tragis, melainkan sebuah representasi visual yang merefleksikan secara mendalam nuansa kehidupan masyarakat Minangkabau pada tahun 1930-an. Berbagai aspek budaya Minangkabau, mulai dari sistem perkawinan, tatanan kekerabatan, hingga konflik yang muncul akibat tegangan antara nilai-nilai adat dan individu, tergambar jelas dalam alur ceritanya (Wibisena & Iqbal, 2021; Tufail *et al.*, 2024). Kisah cinta yang memilukan antara Zainuddin, seorang pemuda berdarah campuran Minang-Makassar, dan Hayati, seorang gadis Minangkabau asli, menjadi titik sentral. Romansa mereka terganjal oleh kekakuan adat Minangkabau yang menolak Zainuddin karena ia tidak memiliki status "minang tulen" dalam sistem matrilineal. Hambatan ini bukan hanya persoalan personal, melainkan manifestasi dari budaya politik yang mengakar kuat pada sistem adat, di mana asal-usul dan garis keturunan memegang peranan krusial dalam penerimaan sosial dan legitimasi (Tufail *et al.*, 2024).

Mengingat signifikansi film sebagai cermin budaya dan pentingnya pemahaman akan budaya politik suatu masyarakat, penelitian ini berupaya untuk membongkar dan menganalisis secara lebih mendalam representasi budaya politik Minangkabau sebagaimana ditampilkan dalam film "Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck". Pendekatan kualitatif akan menjadi landasan metodologis, memanfaatkan studi literatur yang ekstensif terhadap berbagai teks primer dan sekunder yang membahas budaya Minangkabau, sejarah, adat istiadat, serta konsep budaya politik secara umum. Selain itu, analisis mendalam terhadap adegan, dialog, simbol, dan karakter dalam film akan dilakukan untuk mengidentifikasi bagaimana elemen-elemen ini merefleksikan nilai-nilai, norma-norma, dan dinamika kekuasaan dalam masyarakat Minangkabau. Melalui lensa analisis ini, kami berharap dapat menyajikan pemahaman yang lebih kaya dan bernuansa mengenai interaksi antara adat, sistem kekerabatan matrilineal, dan nilai-nilai kolektif yang membentuk budaya politik Minangkabau, sebagaimana diabadikan dan ditafsirkan melalui medium sinema. Penelitian ini tidak hanya akan memperkaya diskursus mengenai budaya Minangkabau, tetapi juga memberikan kontribusi pada studi representasi budaya dalam film dan dampaknya terhadap pemahaman sosial.

Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan fokus pada studi literatur dan analisis film. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan holistik mengenai fenomena budaya politik Minangkabau yang direpresentasikan dalam film, serta menangkap nuansa dan makna-makna yang terkandung di dalamnya (Moleong, 2006).

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi kasus kualitatif dengan fokus pada analisis isi (content analysis) terhadap film dan studi literatur.

Sumber Data



Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

1. **Studi Literatur:** Sumber data literatur akan mencakup berbagai bahan tertulis yang relevan. Ini meliputi buku-buku tentang antropologi budaya Minangkabau, sejarah Minangkabau, adat istiadat, filsafat "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" (misalnya Asniah, 2023; Fajria & Fitriisa, 2024; Khairuna *et al.*, 2024; Althafullayya & Akbar, 2024; Sulhati, 2020), serta jurnal-jurnal ilmiah dan artikel yang membahas konsep budaya politik (misalnya Tufail *et al.*, 2024) dan studi film (misalnya Akmal, 2022; Wibisena & Iqbal, 2021; Trisnawati & Yesicha, 2018). Literatur ini berfungsi sebagai kerangka teoritis dan kontekstual untuk memahami representasi yang ditemukan dalam film.
2. **Film "Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck" (2013):** Film ini menjadi objek utama analisis. Peneliti akan memperoleh akses ke film melalui media massa yang tersedia secara publik, baik melalui platform streaming legal, layanan televisi berlangganan, atau bentuk media lain yang sah. Penontonan film akan dilakukan secara berulang-ulang untuk memastikan identifikasi menyeluruh terhadap elemen-elemen yang relevan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Analisis Dokumen/Literatur:** Peneliti akan secara sistematis mengumpulkan, membaca, dan menganalisis literatur yang relevan. Proses ini melibatkan identifikasi konsep-konsep kunci terkait budaya Minangkabau (matrilineal, adat, ABS-SBK), budaya politik (kekuasaan, pengambilan keputusan, norma sosial), dan teori-teori representasi dalam film. Catatan mendalam akan dibuat untuk setiap sumber yang relevan.
2. **Analisis Film (Non-Partisipan):** Film "Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck" akan dianalisis secara intensif. Proses analisis akan meliputi:
 - Pencatatan Detail: Melakukan pencatatan detail adegan demi adegan, dialog, karakter, kostum, latar, simbol, dan elemen-elemen sinematik lainnya yang relevan dengan representasi budaya politik Minangkabau.
 - Identifikasi Tema: Mengidentifikasi tema-tema yang muncul berulang kali terkait dengan adat, kekerabatan, peran gender, konflik antar nilai, dan dinamika kekuasaan dalam masyarakat Minangkabau.
 - Analisis Semiotika/Naratif:

Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan teknik analisis isi kualitatif, yang melibatkan beberapa tahapan:

1. **Reduksi Data:** Mengidentifikasi dan memilih data yang paling relevan dengan fokus penelitian, yaitu representasi budaya politik Minangkabau. Data yang tidak relevan akan dieliminasi.
2. **Penyajian Data:** Mengorganisasikan data yang telah direduksi ke dalam bentuk deskriptif, kategori, atau pola-pola tematik untuk memudahkan pemahaman. Ini bisa berupa tabel, matriks, atau narasi deskriptif.
3. **Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan:** Menafsirkan pola-pola yang muncul dari data dengan mengacu pada kerangka teoritis budaya Minangkabau dan budaya politik. Proses ini melibatkan pencarian hubungan antar-konsep, perbandingan dengan



literatur yang ada, dan penarikan kesimpulan yang kredibel mengenai representasi budaya politik Minangkabau dalam film "Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck". Peneliti akan berusaha mengaitkan temuan dari film dengan konteks budaya Minangkabau yang sesungguhnya berdasarkan studi literatur.

Melalui kombinasi studi literatur yang kuat dan analisis mendalam terhadap film sebagai objek, penelitian ini diharapkan mampu mengungkap dimensi-dimensi budaya politik Minangkabau yang seringkali tersembunyi namun berpengaruh kuat dalam narasi sinematik.

Hasil Dan Pembahasan

Pembahasan ini akan mengelaborasi temuan-temuan kunci dari analisis film "Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck" yang diperkaya oleh kajian literatur mendalam tentang budaya Minangkabau. Fokus utama adalah menguraikan representasi budaya politik Minangkabau, yang terwujud dalam sistem kekerabatan matrilineal, integrasi adat dan syarak, serta dinamika antara kepentingan individu dan kolektif.

Matrilineal: Arsitek Utama Budaya Politik Minangkabau dalam Film

Sejak awal narasi, film "Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck" secara gamblang menempatkan sistem kekerabatan matrilineal sebagai poros utama yang menggerakkan sekaligus membelenggu karakter-karakternya. Bukan sekadar garis keturunan, matrilineal dalam konteks Minangkabau adalah sebuah sistem sosial yang komprehensif, mengatur hak waris, kedudukan sosial, hingga struktur pengambilan keputusan dalam *nagari* (desa adat). Literatur menunjukkan bahwa matrilinealisme di Minangkabau menjadikan perempuan sebagai "pemilik" garis keturunan dan warisan adat, termasuk rumah gadang, yang secara tidak langsung memberikan mereka posisi sentral dalam struktur sosial (Sulhati, 2020).

Representasi ini terlihat jelas dalam film melalui perlakuan terhadap Zainuddin. Meskipun ia memiliki ayah berdarah Minangkabau, ibunya berasal dari Makassar. Status ini, dalam kacamata adat Minangkabau yang sangat menekankan "minang tulen" melalui garis ibu, menjadikan Zainuddin sebagai "orang luar" atau *sumando* yang tidak memiliki *pusako* (warisan adat) dan suku (klan) yang jelas di kampung halaman ayahnya (Tufail et al., 2024). Penolakan keluarga Hayati terhadap lamaran Zainuddin, yang diungkapkan secara eksplisit dalam dialog dan ekspresi tokoh Ninik Mamak, bukan semata karena perbedaan kasta ekonomi, melainkan karena ketiadaan legitimasi adat. Ini adalah manifestasi nyata dari budaya politik Minangkabau di mana keabsahan individu dalam struktur sosial dan haknya untuk menikah dengan perempuan Minangkabau murni sangat bergantung pada ikatan matrilineal. Kekuasaan untuk memberikan restu perkawinan, yang seyogianya ada pada Ninik Mamak sebagai pemangku adat, menunjukkan bagaimana keputusan personal pun tunduk pada otoritas komunal yang berakar pada sistem kekerabatan. Mereka bertindak sebagai representasi kolektif dari hukum adat, membatasi kebebasan individu demi menjaga kemurnian garis keturunan dan tatanan sosial yang telah baku.



Selain itu, posisi Hayati sebagai kemenakan penghulu adat semakin menguatkan pentingnya garis keturunan ibu. Ia adalah bagian dari kaum (kelompok kekerabatan) yang memiliki kedudukan terhormat. Konflik yang dialami Hayati setelah menikah dengan Aziz, dan bagaimana ia tidak memiliki kuasa penuh atas dirinya sendiri di rumah Aziz karena tuntutan adat, juga secara halus menunjukkan bagaimana sistem matrilineal, meskipun memberikan posisi terhormat pada perempuan di satu sisi, di sisi lain juga membelenggu mereka dalam ekspektasi dan norma komunitas (Trisnawati & Yesicha, 2018). Keputusan Hayati untuk menikah dengan Aziz, meskipun hatinya tetap untuk Zainuddin, adalah bentuk kepatuhan terhadap "kebijakan" kolektif yang dipaksakan oleh keluarganya, demi menjaga nama baik dan tatanan adat. Hal ini mengilustrasikan bagaimana budaya politik di Minangkabau menempatkan kepentingan kaum dan nagari di atas kehendak pribadi, sebuah ciri khas masyarakat komunal yang kuat.

Untuk lebih jelasnya, beberapa adegan yang menyoroti aspek matrilineal sebagai fondasi budaya politik Minangkabau dalam film dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1: Representasi Matrilineal dalam Budaya Politik Minangkabau

Adegan/Dialog Kunci	Representasi dalam Film	Aspek Budaya Politik Minangkabau	Kaitan dengan Literatur
Penolakan lamaran Zainuddin oleh keluarga Hayati. Dialog para Ninik Mamak.	Para pemangku adat dengan tegas menolak Zainuddin karena ia tidak memiliki "suku" atau garis keturunan matrilineal yang jelas di Minangkabau.	Legitimasi Kekerabatan: Kekuasaan dan penerimaan sosial sangat bergantung pada identitas matrilineal. Keputusan personal (pernikahan) tunduk pada otoritas komunal. Menguatkan konsep sumando sebagai orang luar dan pentingnya suku (klan) dalam sistem matrilineal (Tufail <i>et al.</i> , 2024)	Menguatkan konsep sumando sebagai orang luar dan pentingnya suku (klan) dalam sistem matrilineal (Tufail <i>et al.</i> , 2024).
Posisi Hayati sebagai kemenakan penghulu.	Hayati secara otomatis memiliki status sosial yang tinggi dan terikat pada nama baik serta keputusan kaum (keluarga besar).	Struktur Hierarki Adat: Kedudukan sosial individu ditentukan oleh garis keturunan ibu dan posisinya dalam struktur adat. Perempuan sebagai pewaris garis keturunan memiliki peran penting namun juga terikat norma.	Menunjukkan sentralitas perempuan dalam garis keturunan (Sulhati, 2020) sekaligus beban ekspektasi komunitas (Trisnawati & Yesicha, 2018).
Keputusan Hayati menerima Aziz atas desakan	Hayati mengorbankan perasaan pribadinya demi memenuhi	Supremasi Kolektif atas Individu: Kepentingan kaum atau nagari didahulukan di atas	Menjelaskan bagaimana nilai komunalisme menekan



keluarga.	tuntutan keluarga dan adat untuk menjaga kehormatan kaum.	kehendak pribadi, bahkan dalam urusan asmara dan pernikahan.	individualisme dalam konteks adat Minangkabau.
-----------	---	--	--

"Adat Basandi Syarak": Negosiasi Kekuasaan dan Otoritas dalam Film

Filosofi "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" (adat bersendikan syariat, syariat bersendikan Kitabullah) adalah jantung dari budaya Minangkabau. Ini bukan hanya slogan, melainkan kerangka kerja yang mengatur segala aspek kehidupan, termasuk cara kekuasaan dijalankan dan keputusan diambil (Asniah, 2023; Fajria & Fitrisia, 2024; Khairuna *et al.*, 2024; Althafullayya & Akbar, 2024). Film "Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck" memperlihatkan kompleksitas hubungan antara adat dan Islam ini, terkadang harmonis, namun seringkali juga memicu ketegangan dalam budaya politik.

Dalam film, peran sentral para pemangku adat, khususnya Ninik Mamak, ditampilkan secara jelas dalam adegan ketika keluarga Hayati menolak lamaran Zainuddin. Pada saat itu, para Ninik Mamak berunding dan menyatakan penolakannya dengan menegaskan bahwa Zainuddin tidak memiliki suku yang sah menurut garis keturunan Minangkabau. Adegan ini memperlihatkan bagaimana figur adat berfungsi sebagai otoritas utama dalam menentukan keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat. Mereka adalah penjaga tradisi dan penentu "benar" atau "salah" dalam masyarakat. Keputusan mereka untuk menolak Zainuddin didasarkan pada penafsiran ketat terhadap adat *minang tulen*, yang pada dasarnya adalah bentuk implementasi kekuasaan adat. Namun, film juga menyiratkan adanya pengaruh nilai-nilai Islam. Misalnya, meskipun adat menolak Zainuddin, ada upaya untuk menjaga silaturahmi atau setidaknya menghindari konflik yang berlebihan. Hal ini mencerminkan aspek syarak yang menekankan persaudaraan dan keadilan, meskipun pada akhirnya adat yang diinterpretasikan secara rigid lebih mendominasi dalam kasus Zainuddin.

Konflik moral yang dialami Hayati dan Aziz juga dapat dianalisis dari perspektif ini. Keputusan mereka untuk menuruti adat dan menikah adalah bentuk ketaatan terhadap sistem sosial yang berlaku, namun kemudian menimbulkan penderitaan batin. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Islam memberikan batasan moral, interpretasi adat yang kaku terkadang dapat mengesampingkan aspek-aspek kemanusiaan atau keadilan personal. Dalam ranah budaya politik, ini berarti bahwa otoritas adat (yang didukung oleh interpretasi syarak yang mungkin selektif) bisa menjadi sangat dominan, bahkan mengalahkan kehendak individual yang dilandasi perasaan atau pemahaman spiritual yang berbeda.

Dialog-dialog yang sarat dengan peribahasa Minang dan rujukan pada tatanan adat menunjukkan bahwa bahasa itu sendiri menjadi medium representasi budaya politik. Kata-kata yang diucapkan oleh para tokoh, terutama Ninik Mamak, bukan sekadar percakapan biasa, melainkan pernyataan otoritas dan legitimasi atas keputusan-keputusan komunal (Wibisena & Iqbal, 2021). Hal ini memperlihatkan bahwa dalam masyarakat Minangkabau, kekuasaan tidak hanya diekspresikan melalui tindakan, tetapi juga melalui wacana dan narasi yang mengakar pada kebijaksanaan lokal dan ajaran agama.



Tabel 2: Representasi Adat Basandi Syarak dalam Dinamika Kekuasaan

Adegan/Dialog Kunci	Representasi dalam Film	Aspek Budaya Politik Minangkabau	Kaitan dengan Literatur
Musyawarah Ninik Mamak mengenai Zainuddin dan Hayati.	Para pemangku adat berunding dan mengambil keputusan kolektif untuk menolak Zainuddin, berlandaskan interpretasi adat.	Otoritas Adat: Ninik Mamak sebagai pemegang kekuasaan adat memiliki wewenang final dalam keputusan komunal, bahkan yang sangat memengaruhi hidup individu.	Merefleksikan peran Ninik Mamak sebagai pengemban adat (Althafullayya & Akbar, 2024).
Dialog yang penuh peribahasa dan rujukan adat.	Penggunaan bahasa yang kaya akan peribahasa Minang oleh tokoh-tokoh adat.	Wacana Kekuasaan: Bahasa menjadi alat untuk menegaskan norma, legitimasi, dan otoritas adat dalam komunikasi politik sehari-hari.	Bahasa adalah medium ekspresi budaya (Wibisena & Iqbal, 2021).
Zainuddin mencoba berargumen dengan adat.	Upaya Zainuddin untuk menentang norma adat dengan logika personalnya, namun tidak berhasil.	Kekuatan Norma Adat: Meskipun ada nilai syarak yang fleksibel, interpretasi adat yang kaku seringkali mendominasi dan sulit digoyahkan oleh argumen personal.	Menunjukkan kuatnya pengikat adat yang terkadang mengalahkan kebebasan individu (Fajria & Fitrisia, 2024).

Individu dalam Cengkraman Kolektif: Representasi Konflik dalam Budaya Politik

Salah satu aspek paling menyentuh dalam film ini adalah konflik yang dialami oleh karakter utama, Zainuddin dan Hayati, ketika keinginan pribadi mereka berbenturan dengan tuntutan dan ekspektasi kolektif dari masyarakat Minangkabau. Dalam budaya politik yang sangat komunal seperti Minangkabau, konsep individualisme seringkali harus tunduk pada harmoni sosial dan kepentingan kaum (keluarga besar) atau *nagari*.

Penolakan Zainuddin dan pemaksaan pernikahan Hayati dengan Aziz adalah representasi dramatis dari bagaimana keputusan-keputusan krusial dalam hidup individu tidak sepenuhnya berada di tangan mereka sendiri, melainkan diatur oleh otoritas adat dan konsensus keluarga (Tufail *et al.*, 2024). Zainuddin, dengan latar belakang "campuran" dan status sumando yang tidak diakui sepenuhnya, menjadi simbol dari seorang individu yang terpinggirkan oleh sistem. Perjuangannya untuk mendapatkan Hayati adalah upaya untuk menantang struktur yang tidak memberinya ruang, namun pada akhirnya ia harus mengakui kekuatan sistem. Ini adalah pelajaran pahit tentang batas-batas kebebasan individu dalam budaya politik yang sangat mengedepankan kolektivitas dan "keserasian" adat (Trisnawati & Yesicha, 2018).



Bahkan setelah Zainuddin berhasil dalam kariernya dan menjadi seorang penulis ternama, status sosialnya yang baru tidak serta merta menghapus stigma "non-Minang tulen" dalam pandangan adat. Ini menunjukkan bahwa dalam budaya politik yang direpresentasikan film, legitimasi sosial lebih dari sekadar kekayaan atau ketenaran; ia sangat terikat pada garis keturunan dan kepatuhan pada adat. Meskipun ada pergeseran zaman dan modernisasi, film ini menggarisbawahi betapa kuatnya pengaruh tradisi dalam mengatur hubungan sosial dan politik di tingkat lokal.

Konflik ini juga menyoroti peran musyawarah dalam budaya politik Minangkabau. Meskipun musyawarah idealnya mencari mufakat, dalam kasus film ini, ia tampak lebih sebagai formalitas untuk mengesahkan keputusan yang telah didominasi oleh interpretasi rigid para pemangku adat. Ini menunjukkan sisi lain dari budaya politik yang idealnya egaliter dan demokratis (dalam konteks adatnya), namun dalam praktiknya bisa menjadi sangat hierarkis dan restriktif bagi individu yang "berbeda".

Tabel 3: Representasi Konflik Individu vs. Kolektif dalam Film

Adegan/Dialog Kunci	Representasi dalam Film	Aspek Budaya Politik Minangkabau	Kaitan dengan Literatur
Perjuangan Zainuddin melawan penolakan adat.	Zainuddin mencoba bertahan dan meyakinkan, namun akhirnya terpaksa menyerah pada kekuatan adat yang tak tergoyahkan.	Dominasi Kolektif: Keinginan dan hak individu seringkali dikorbankan demi menjaga tatanan dan kehormatan kaum atau adat secara keseluruhan.	Merefleksikan politik identitas Minang yang mengedepankan kemurnian darah (Tufail <i>et al.</i> , 2024).
Penderitaan batin Hayati setelah menikah dengan Aziz.	Hayati secara fisik menikah dengan Aziz, namun jiwanya menderita karena tidak bahagia, menunjukkan pengorbanan personal.	Beban Adat pada Individu: Individu, terutama perempuan, dapat tertekan oleh ekspektasi dan paksaan adat yang membatasi pilihan hidup mereka.	Menjelaskan konsekuensi sosial dari kekakuan adat terhadap individu (Trisnawati & Yesicha, 2018).
Status Zainuddin yang sukses tapi tetap dipandang sebagai "orang luar".	Meskipun Zainuddin kaya dan terkenal, ia tidak sepenuhnya diterima sebagai bagian "sah" dari komunitas adat Hayati.	Legitimasi Berbasis Keturunan: Pengakuan sosial dan politik dalam Minangkabau tidak hanya berdasarkan pencapaian, tetapi juga garis keturunan dan kepatuhan adat.	Menyoroti hirarki sosial yang kuat berdasarkan garis darah dalam budaya Minangkabau.

Analisis Visual dalam Representasi Budaya Politik Minangkabau



Selain melalui dialog dan alur cerita, film *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck* juga menampilkan representasi budaya politik Minangkabau melalui elemen-elemen visual yang sarat makna simbolik. Analisis visual ini penting karena memperlihatkan bagaimana tanda-tanda sinematik berfungsi sebagai medium representasi budaya dan kekuasaan adat.

Pertama, kostum dan busana adat. Tokoh perempuan Minangkabau dalam film, termasuk Hayati, kerap ditampilkan mengenakan busana tradisional seperti baju kurung dan selendang. Pakaian ini bukan sekadar ornamen, melainkan simbol legitimasi kultural yang menunjukkan identitas keanggotaan dalam masyarakat matrilineal. Adegan ketika Hayati tampil dalam busana adat pada acara keluarga besar, misalnya, menegaskan posisinya sebagai perempuan Minangkabau tulen yang memiliki garis keturunan jelas, berbeda dengan Zainuddin yang tidak memiliki legitimasi visual serupa.

Kedua, rumah gadang sebagai latar. Penggambaran rumah gadang dalam beberapa adegan bukan hanya sekadar setting visual, tetapi simbol kepemilikan matrilineal dan pusat legitimasi adat. Rumah gadang, yang diwariskan melalui garis ibu, menegaskan dominasi sistem matrilineal sebagai basis budaya politik Minangkabau. Kehadiran rumah gadang di layar memperlihatkan keterikatan antara ruang fisik, identitas sosial, dan struktur kekuasaan adat.

Ketiga, simbol kapal dan laut. Visual kapal yang akhirnya tenggelam menjadi metafora utama dari runtuhnya harapan Zainuddin akibat kekakuan adat. Laut luas yang mengelilingi kapal melambangkan kebebasan individu, tetapi pada akhirnya benturan dengan daratan (simbol adat yang kaku) membuat kebebasan itu karam. Simbol visual ini memperkuat pesan tentang keterbatasan ruang gerak individu dalam sistem komunal yang rigid.

Keempat, ekspresi visual tokoh. Film juga menekankan penderitaan individu melalui ekspresi wajah dan bahasa tubuh. Raut wajah Zainuddin ketika ditolak oleh keluarga Hayati, serta ekspresi Hayati saat mengenakan kebaya pengantin, memperlihatkan konflik batin yang tak terucapkan secara verbal. Visual ini menjadi penegasan bahwa keputusan adat yang diambil oleh kolektivitas sering kali membawa penderitaan personal yang mendalam.

Dengan demikian, elemen-elemen visual dalam film tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap narasi, tetapi juga sebagai tanda sinematik yang memperkuat representasi budaya politik Minangkabau. Visualisasi ini menjadikan film sebagai teks budaya yang menyampaikan pesan politik secara lebih kaya, melalui kombinasi simbol, ruang, dan ekspresi yang mencerminkan keterikatan kuat antara adat, identitas, dan kekuasaan komunal.

Simpulan

Melalui penjelajahan mendalam terhadap film "*Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck*" dan disandingkan dengan tinjauan literatur mengenai budaya Minangkabau, penelitian ini telah berhasil mengurai benang merah representasi budaya politik yang kompleks dan kuat dalam masyarakat Minangkabau. Film ini, lebih dari sekadar kisah romansa tragis, berfungsi



sebagai cermin yang memantulkan bagaimana struktur sosial, nilai-nilai adat, dan ajaran agama saling berkelindan membentuk lanskap politik di tingkat komunitas.

Temuan utama menunjukkan bahwa sistem kekerabatan matrilineal berdiri kokoh sebagai arsitek fundamental budaya politik Minangkabau yang direpresentasikan dalam film. Garis keturunan ibu bukan hanya sekadar penentu identitas pribadi, melainkan sebuah prasyarat mutlak untuk legitimasi sosial dan politik. Kasus Zainuddin, yang meski berdarah Minang dari sang ayah namun ditolak karena ketiadaan "suku" dari garis ibu, secara gamblang memperlihatkan bahwa kekuasaan untuk menerima atau menolak seseorang ke dalam tatanan sosial berada di tangan pemangku adat yang mewakili kolektivitas matrilineal. Keputusan krusial seperti pernikahan, yang seyogianya bersifat personal, justru menjadi arena di mana otoritas kaum dan nagari tampil dominan, membatasi pilihan individu demi menjaga kemurnian adat dan kehormatan keluarga. Ini menegaskan bahwa dalam budaya politik Minangkabau, afiliasi kekerabatan adalah fondasi legitimasi politik yang jauh melampaui pencapaian individual.

Selanjutnya, filosofi "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" (ABS-SBK) terbukti menjadi kerangka normatif yang membentuk dinamika kekuasaan dan pengambilan keputusan. Meskipun idealnya prinsip ini menciptakan harmoni antara tradisi dan agama, film ini secara subtil memperlihatkan adanya ketegangan. Para Ninik Mamak, sebagai pemangku adat, menginterpretasikan adat dengan otoritas penuh, yang terkadang mengesampingkan aspek-aspek kemanusiaan atau spiritual yang lebih luas dari syarak. Keputusan yang mereka ambil, meski dalam bingkai musyawarah, seringkali terasa sebagai penegasan otoritas yang tidak dapat diganggu gugat, mencerminkan adanya hierarki kekuasaan di mana interpretasi adat oleh golongan tua dan berkedudukan tinggi sangat dominan. Bahasa yang digunakan, kaya akan peribahasa dan rujukan adat, juga menjadi alat politik yang menguatkan legitimasi dan otoritas para pemangku adat dalam komunikasi sehari-hari, menunjukkan bahwa kekuasaan tidak hanya diejawantahkan dalam tindakan, tetapi juga dalam wacana.

Yang paling mengharukan dan menjadi inti konflik dalam film ini adalah tegangan antara kepentingan individu dan tuntutan kolektif. Kisah Zainuddin dan Hayati adalah manifestasi nyata dari bagaimana individu dalam budaya Minangkabau yang komunal harus berhadapan dengan kekuatan adat yang membayangi pilihan personal mereka. Cinta mereka kandas bukan karena ketidakcocokan pribadi, melainkan karena sistem yang tidak memberi ruang bagi "yang berbeda" atau "yang tidak memenuhi standar adat". Penderitaan batin Hayati dan Zainuddin adalah harga yang harus dibayar demi menjaga kehormatan kaum dan kelangsungan tatanan adat. Hal ini menggarisbawahi bahwa dalam budaya politik Minangkabau, harmonisasi sosial dan kepatuhan pada norma kolektif acap kali menempatkan batasan yang ketat pada kebebasan personal, mencerminkan kuatnya nilai komunalisme yang mendefinisikan tatanan politik mereka.



Secara keseluruhan, film "Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck" adalah sebuah karya sinematik yang kaya, tidak hanya dalam narasi dramatisnya, tetapi juga sebagai medium representasi budaya politik Minangkabau. Ia berhasil menggambarkan bagaimana matrilinealisme, integrasi adat-sarak, dan dinamika individu-kolektif secara inheren membentuk sistem kekuasaan, pengambilan keputusan, dan legitimasi sosial dalam masyarakat Minangkabau. Meskipun film ini berlatar masa lalu, pelajaran yang dapat dipetik relevan untuk memahami akar-akar budaya politik di Indonesia, di mana tradisi lokal seringkali tetap memegang peranan penting di tengah arus modernisasi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya khazanah studi budaya Minangkabau dan representasi film, tetapi juga membuka ruang diskusi lebih lanjut tentang interaksi kompleks antara adat, agama, dan politik dalam konteks masyarakat multikultural.

Daftar Pustaka

- Akmal, Muhammad. (2022). Representasi Nilai Kebudayaan Minangkabau Dalam Film Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck. *Journal of Intercultural Communication and Society*, 1(1), 11-30. <https://journal.rc-communication.com/index.php/JICS/article/view/18>
- Althafullayya, Muhammad Raffin, & Akbar, Ali. (2024). Analisis Integrasi Islam dan Budaya Minangkabau dalam Tradisi Batagak Penghulu Berdasarkan Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1-12. <https://edu.pubmedia.id/index.php/pjpi/article/view/155>
- Asniah. (2023). Akulturasi Islam dan Hukum Adat Minangkabau. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 18(1), 1-24. doi: <https://www.google.com/search?q=https://doi.org/10.24042/al-adyan.v18i1.15883>
- Astuti, D., Agustang, A., & Idrus, I. I. (n.d.). POLITIK IDENTITAS DALAM KONTROVERSI ISU DI INDONESIA. *Jurnal Sibatik*. <https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK/article/download/888/674/1799>
- Defense Journal Post. (2023, 4 Februari). Belajar dari Kisah Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck: Ngaji Filsafat - Dr. Fahrudin Faiz. YouTube. https://youtu.be/Ep0pQ8W8_ZQ?si=jecYzOPf6rRbf1TV
- Fajri, P. C. (2023). Dominasi Politik Identitas dalam Kontestasi Politik Indonesia serta Mitigasinya Jelang Pemilu 2024. *JDPL (Jurnal Demokrasi Dan Politik Lokal)*, 5(2). <https://jdpl.fisip.unand.ac.id/index.php/jdpl/article/download/436/80/>
- Fajria, Rahmah, & Fitrisia, Azmi. (2024). Tinjauan Literatur Falsafah Adat Minangkabau: Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. *Journal of Education Research*, 1811, 1-7. <https://www.jer.or.id/index.php/jer/article/view/994>
- Khairuna Herlin Manday, Elly Warnisyah Harahap, & Endang Ekowati. (2024). Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah dalam Pandangan Masyarakat Minangkabau (di Kelurahan Sukaramai I, Kecamatan Medan Area Kota Medan). *Volume 8 Nomor 1 Tahun 2024*, 9036-9046. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/13762>
- MJS Channel. (2021, 24 Februari). Ngaji Filsafat 299: Buya Hamka - Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck. YouTube. <https://youtu.be/LAxyZAgdjsc?si=Uv-ZX-W3cw0yp26C>
- Moleong, J. Lexy. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosdakarya.



- Prawiradilaga, D. F., & Prahasti, C. (2023). Rethinking national identity construction through independent films in the Indonesia creative industry. *ProTVF*, 7(Special Issue), 183-194. <https://jurnal.unpad.ac.id/protvf/article/download/41905/21148>
- Sulhati. (2020). Islam and Minangkabau Culture. *Proceeding International Conference on Culture, Language and Literature (IC2LC)*, 199-205. <https://proceeding.umsu.ac.id/index.php/ic2lc/article/download/47/43>
- Tamba, R. H., & Sudana, A. N. (2024). Chinese Indonesians in Action: Political Identity Representation in Contemporary Indonesian Popular Films. *Dirasat: Human and Social Sciences*, 51(3), 1-18. <https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Hum/article/view/40>
- Trisnawati, & Yesicha, Chelsy. (2018). Representasi Budaya Matrilineal Minangkabau dalam Film *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck*. *Jurnal Riset Komunikasi (JURKOM)*, 1(2), 276-284. <https://jurnalrisetkomunikasi.org/index.php/jrk/article/view/40>
- Tufail, Kustiawan, Saputra, Aditya Wahyu, Rahmadina, Dyas Puzi, Balqis, Kharisma Putri, Nursyawal, M., Putri, Nur Thasya Mustiqa, Hefir, Syaihidina, & Abial, Wiky Dwifa. (2024). Politik Identitas Minang dan Multikulturalisme Dalam Film "Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck". *Jurnalika: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8(2), 1-14. doi: [10.37949/jurnalika82147](https://doi.org/10.37949/jurnalika82147)
- Wibisena, Riesangaji, & Iqbal, Moch. (2021). Islam Dan Budaya Minangkabau Dalam Film *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck*. *DAWUH: Da'wah & Communication Islamic Jurnal*. 1-11. <https://www.siducat.org/index.php/dawuh/article/download/204/168>
- Yunus, T. HM., Yasin, S. R. (2023). Politik Identitas dan Politisasi Agama dalam Konteks Pemilu di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial*, 9(2). <https://ojs.unimal.ac.id/dialektika/article/download/12590/pdf>